**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan, tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan legislator, akademisi, hingga pemerhati keluarga dengan masing-masing cara pandangnya. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri untuk negara modern yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem hukum nasional seperti Indonesia.

Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat[[1]](#footnote-2)menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut. Namun demikian, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam melalui isu usia perkawinan di Indonesia secara lengkap, tentu tidak serta merta bisa dilepaskan dari studi sejarah sosial legislasi perkawinan yang sudah terukir panjang di negeri ini. Bahkan, penelusuran terhadap aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamikanya, merupakan sebuah keniscayaan.

Perlu diketahui bahwa eksistensi dan entitas hukum Islam, terutama pasca kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi penting bagi laju perkembangan masyarakatnya ke depan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangat terkait erat dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umat Muslim ketika menghadapkan nasib hukum Islam kepada negara.[[2]](#footnote-3)

Sementara itu, meskipun kehidupan pasca kemerdekaan dihadapkan pada tuntutan kemodernan, tradisi hukum Islam masih memiliki ruang tersendiri ketika pada saat yang sama, beriringan dengan perkembangan dunia, terutama di Indonesia.[[3]](#footnote-4)Ratno Lukito, misalnya, menyebut bahwa setelah terhapusnya feodalisme, negara ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat tradisi hukum yang berbeda-beda. Intervensi inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan sistem hukum nasional tanpa mengesampingkan eksistensi hukum yang sudah ada seperti hukum Islam atau adat, sehingga hukum menjadi ruang ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam institusi-institusi negara seperti lembaga peradilan.[[4]](#footnote-5)

Sistem peradilan hukum keluarga Islam, sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional tersebut, nyatanya juga memiliki ruang lingkup historisitas yang cukup panjang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dinamika proseslegislasi yang dilakukan pemerintah, meskipun pada awal kemerdekaan pemerintah tidak terlalu kuat pedulinya dengan institusi peradilan Islam. Terkait ini, menurut temuan Ratno, misalnya, sikap enggannya pemerintah dalam upaya legislasi praktik hukum Islam lebih dikarenakan oleh ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang mana menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain terdapat metodologi hukum yang berbeda antara umat Islam dan negara, paling tidak untuk saat itu. Akibatnya, pemerintah yang hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja, berdampak pada praktik hukum keluarga yang masih berbanding lurus dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.[[5]](#footnote-6)

Selain itu, peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, juga menandai terjadinya perubahan signifikan dari masalah yang awalnya hanya berkutat pada administrasi peradilan Islam kepada perumusan regulasi yang spesifik, terutama dalam masalah praktik hukum keluarga. Menguatnya paham tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta didukung oleh instrument-instrument hukum yang telah ada sebelumya, berdampak pada semakin giatnya pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan-peraturan tentang hukum keluarga. Salah satu capaiannya adalah penetapan UU PerkawinanNo. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Dalam hal ini, pemerintah telah berhasil mengartikulasi unsur-unsur penting dalam praktik hukum keluarga Islam ke dalam bahasa hukum baku yang sampai kini berlaku nasional.[[6]](#footnote-7)

Konteks awal periode penetapan UUP di atas, dalam catatan sejarah juga tidak bisa dilepas dari konteks sosio-historisnya. Walaupun UUP merupakan salah satu bentuk modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia, oleh DanielS. Lev, misalnya, sebagaimana dikutip Maltuf Siroj, masih terkesan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya sikap taklid sebagian masyarakat Indonesia atas mazhab tertentu, sedangkan di pihak lain, posisi hukum Islam dalam konteks negara selalu menuai polemik khususnya dalam panggung perdebatan ideology negara, sehingga hukum Islam seakan berada pada titik tengah antara paradigm agama dan paradigma negara.[[7]](#footnote-8)

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial di atas, membuat upaya negara melalui UUP berhasil merubah beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan.[[8]](#footnote-9) Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu sekaligus mengubah tradisi hukum Islam yang mana tidak mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan[[9]](#footnote-10) menjadi suatu aturan yang jelas, meskipun terjadi perdebatan panjang antar otoritas dalam proses legislasinya.

Dalam catatan sejarah, penerapan dan penyeragaman batas minimum usia perkawinan di Indonesia, pada awalnya, ingin diatur melalui isi pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP tahun 1973 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki dan 19 tahun bagi perempuan.[[10]](#footnote-11)Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya harus ditunda.

Dilema yang dihadapi RUU-UUP 1973 untuk mengatur usia perkawinan di atas tidak terlalu lama. Hal ini berakhir dalam penetapan resmi UUP 1974 tetapi dengan sedikit perubahan, terutama tentang penentuan usia perkawinan yang akhirnya harus diturunkan. Melalui Pasal 7 ayat (1),[[11]](#footnote-12)UUP 1974, Negara memberikan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.[[12]](#footnote-13)Artinya, ketentuan usia perkawinan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974. Pada fase pergantian ini, sebagaimana temuan Ratno, penyebab dari peristiwa ini adalah: pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada waktu itu, kedua, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.[[13]](#footnote-14)

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan perkawinan harus dalam usia minimun 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP, calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.[[14]](#footnote-15)

Pada perkembangannya, persoalan batas usia perkawinan tersebut di atas, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi, kembali lagi mulai didiskusikan. Bahkan, terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004, meskipun gagal untuk disahkan,[[15]](#footnote-16) Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI), misalnya menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia perkawinan yang sudah *established* tersebut. Tim ini ingin merevisi usia perkawinan dalam UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.[[16]](#footnote-17)

Selanjutnya, masalah usia perkawinan juga muncul kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA). Salah satu pokok materi dalam RUU ini juga menyebut bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).[[17]](#footnote-18)

Tidak hanya itu, isu usia perkawinan ini juga menjadi sorotan bagikalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.[[18]](#footnote-19)Selanjutnya, isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN ini, misalnya, ikut andil dalam sosialisai batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.[[19]](#footnote-20)

Perdebatan tentang batas usia anak dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Halini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baikrisiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.[[20]](#footnote-21)

Adanya kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif ini terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun,[[21]](#footnote-22)sedangkan dalam Undang-Undang No. 26tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).[[22]](#footnote-23)

Oleh sebab itu, revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan padaterjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan;[[23]](#footnote-24)serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikhawatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.[[24]](#footnote-25)*Ketiga,* mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat,* memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia[[25]](#footnote-26), dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[[26]](#footnote-27). Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI yang menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batasan usia perkawinan ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra yang tak ada ujungnya, karena dalam al-Qur’an dan Hadis yang notabene menjadi sumber hukum Islam tidak memberi ketetapan yang jelas dan tegas batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Pada tanggal 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia dikarenakan Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diputuskan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 1, Mengabulkan permohonn para Pemohon untuk sebagian; 2, Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.[[27]](#footnote-28)

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan maka akan memberikan dampak positif . Hal ini sebabkan karena pernikahan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Kasus pernikahan di bawah umur jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental. Pernikahan usia anak ini menimbulkan masalah hukum. Di antaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah umur sangat tinggi. Berdasarkan berita Harian Nasional pada tahun 2016 bahwa ada lima Provinsi di Indonesia yang melaksanakan pernikahan di bawah 18 Tahun. Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Barat 34 persen, Kalimantan Selatan 33,68 persen, Kalimantan Tengah 33,56 persen, Kalimantan Barat 32,21 persen, dan Sulawesi Tengah 31,91 persen.[[28]](#footnote-29)

Hal tersebut merupakan tantangan besar terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Memperhatikan realitas yang ada, tuntutan ke arah mengamandemen undang-undang perkawinan pun bergulir. Mulai dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan (khususnya usia kawin) sampai kepada perubahan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

UU Perkawinan menyatakan batas usia perkawinan untuk laki-laki, yakni 16 tahun. Perbedaan batas usia ini melahirkan diskriminasi yang berpengaruh pada akses pendidikan. Perempuan yang dinikahkan sebelum usia 16 tahun tidak bisa menyenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA). Putusan MK yang menyatakan batas usia perkawinan 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menuntaskan program wajib belajar.

Penghapusan batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah juga dapat mengatasi persoalan kematian ibu dan anak. Belum lagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, angka kematian ibu dan bayi dan tingginya karena menikahnya masih muda.

Dengan demikian, dukungan dan tuntutan tentang revisi UU perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama warga bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia.

Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas, menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengangkat judul penelitian dengan judul Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Per Undang-Undangan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner.

**B. Permasalahan**

**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur akan berdampak terjadi perceraian dikarenakan ketidaksiapan dalam melaksanakan pernikahan.
2. Pernikahan di bawah umur akan menimbulkan dampak kesenjangan ekonomi, sosial, psikologis, reproduksi, kesehatan dan persoalan hukum.
3. Pernikahan di bawah umur berdampak kepada kurangnya keharmonisan keluarga yang meliputi dampak terhadap suami istri dan dampak terhadap anak.
4. Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan tidak relevan lagi untuk diterapkan.
5. Perlu upaya rekonstruksi peraturan usia perkawinan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan.

**2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi pada dua permasalahan, yaitu:

1. Ketentuan pengaturan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Rekonstruksi usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang berkeadilan.

**3. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia perspektif hukum Islam interdisipliner?
2. Bagaimana rekonstruksi usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang berkeadilan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia perspektif hukum Islam interdisipliner.
2. Untuk merekonstruksi usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang berkeadilan.
3. Kegunaan Penelitian
4. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memahami usia minimal pernikahan dalam fiqh dan undang-undang prkawinan dan menganalisis relevansi ketentuan batas minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat.
5. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai kacamata baru dalam melihat ketentuan pasal 7 pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahan pertimbangan untuk revisi dan juga bisa berfungsi sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dalam topik yang terkait.

**D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah menelaah beberapa literatur yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang sudah membahas pengaturan usia perkawinan di Indonesia di antaranya adalah:

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan buku berjudul Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Secara deskriptif, buku ini memberikan pengertian bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam hal hak reproduksi menurut buku ini, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Titik tolak kongkret kedua pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.[[29]](#footnote-30)

Beranjak kepada laporan penelitian, di antaranya Andi Sjamsu Alam dalam disertasi berjudul Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.

Dengan pendekatan filosofis, menemukan bahwa ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam UUP mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin yang mana wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada pengadilan dinilai mengurangi sakralitas perkawinan. Penelitian ini membahas pembedaan usia perkawinan dalam UUP dianggap membakukan peran dan status antara suami-istri dalam pola relasi yang tidak seimbang, dan pada akhirnya mendiskriminasikan wanita. Oleh karena itu, kesetaraan dari segi usia ideal adalah masing-masing calon pengantin berada pada usia 21 tahun, dengan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan kesehatan. Idealisasi usia perkawinan pada usia 21 tahun ini merupakan bagian yang sangat signifikan dalam merekonstruksi pemikiran Hukum Perkawinan di Indonesia.[[30]](#footnote-31)

Penelitian Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang pencatatan dan usia perkawinan merupakan upaya yang nyata dari obyektifikasi hukum perkawinan Islam Indonesia, karena ketentuan tersebut dikatakan secara obyektif yang dirumuskan sebagai salah satu bagian hukum perkawinan Islam Indonesia. Oleh sebab itu, sudah semestinya para pelanggar dua aturan obyektif tersebut dikenai sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan akan mengacaukan aturan hukum yang setelahnya jika itu diabaikan.[[31]](#footnote-32)

Penelitian Khaidarullah, Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia.[[32]](#footnote-33)Penelitian ini mengkaji perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia kawin dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia beserta perdebatan dan polemik yang melingkupinya melalui pendekatan normatif sosiologis-empiris. Dari kajiannya, Khaidarullah memberi beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, diantaranya: (1) penting sekali adanya sinergi perbedaan persepsi untuk mengembangkan metodologi hukum sebagai alat kritis bagi kelemahan aturan usia kawin, (2) review ulang terhadap pengaturan usia kawin, dan (3) pengkajian dengan pendekatan lain.

Penelitian Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, Pertama, praktik perkawinan usia minimal perkawinan merupakan tradisi. Tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja di laut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar. Alternatif yang mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.[[33]](#footnote-34)

Nur Fadilah dan hairiyati Rahmah dengan judul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih). Upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih adalah Pertama, upaya merubah ketentuan (klausul) batas usia dalam regulasi perkawinan dari usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut, khususnya anak perempuan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*rusyd*) menjadi pemimpin keluarga. Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.[[34]](#footnote-35)

Penelitian A. Kumedi Ja’far yang berjudul Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan menganalisis Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan. Dalam hal ini tujuan utama dari penelitian yang di lakukan oleh penelitian adalah; untuk mengkaji proses terbentuknya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; untuk menganalisis korelasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan undang-undang Sisdiknas, ketentuan BKKBN dan Undang-undang perlindungan anak; dan untuk menemukan konstruk pembaruan hukum tentang usia perkawinan yang responsif dengan negara Indonesia.[[35]](#footnote-36)

Bertolak pada pengkajian dan perbandingan antara maksud penyusun dengan hasil karya-karya di atas, dengan beberapa pertimbangan, penelitian ini dengan fokus pada rekonstruksi usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia menurut perspektif hukum Islam interdisipliner.

Untuk itu, dengan menjadikan isu usia perkawinan sebagai objek penelitian, semoga mampu lebih komprehensif dalam mengkaji dinamika usia perkawinan dalam kaitannya dengan pembaruan usia minimal dalam perkawinan.

Berdasarkan pemaparan sejumlah karya ilmiah di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penentuan usia perkawinan masih aktual untuk dijadikan objek penelitian. Hal ini disebabkan isu usia perkawinan yang semakin bergulir untuk dibahas. Dari beberapa penelitian di atas peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji mengenai rekontstruksi usia minimal perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia menurut perspektif hukum Islam interdisipliner. Oleh sebab itu, penulis mengambil dari sudut yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu membahas tentang usia perkawinan dengan pendekatan interdisipliner, dengan harapan melahirkan pembaruan usia minimal perkawinan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan relevan untuk diterapkan saat ini.

**E. Kerangka Teori dan Pikir**

Sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, digunakan teori *Maqāsid Syarī’ah* sebagai *grand theory*. Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau *mukallaf* dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.[[36]](#footnote-37)

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsīl wa al-ibqā’* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan *“jalb al-maṣālih wa daf’ al-mafā’sid”*. Tujuan hukum ditinjau dari segi fitrah dan daya yang dimiliki manusia itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1

Fitrah Manusia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daya Manusia | Fungsi Daya Manusia | Tujuan |
| ‘Aql (Intelektual | Mengetahui dan mengesakan Allah | Mendapatkan tuntunan dan keridhaan Allah |
| Syahwat | Menginduksikan objek-objek menyenangkan | Mencapai kebahagiaan hidup |
| Gaḍab | Mempertahankan diri dan kesenangan | Mempertahankan kebehagiaan |

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber *naqli,* yaitu wahyu, baik al-Qur’an maupun al-Hadis. Tujuan Hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga, terutama tujuan Islam *taklīf*, yaitu hukum yang berupa keharusan:

1. Melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya;

2. Memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya;

3. Hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut.

Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari tingkat dan peringkat kepentingan bagi manusia itu sendiri, yaitu:

1. Tujuan primer atau *ad-ḍarūry* (tujuan yang harus ada demi kehidupan. Jika tidak ada, akan menimbulkan ketidakjelasan kemaslahatan hidup manusia)
2. Tujuan sekunder atau *al-hājiy* (tujuan sekunder bagi manusia seandainya tidak tercapai akan menimbulkan kesulitan atau *masyaqah*).
3. Tujuan tertier atau *at-tahsiniy* (tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan akhlak).[[37]](#footnote-38)

Pengertian substansial Islam hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Sebab, tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan *al-kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqāsid al-syarī’ah* (tujuan-tujuan universal syari’ah. Lima pokok pilar tersebut adalah)

1. *Hifẓal-dīn*, menjamin kebebasan beragama;
2. *Hifẓal-nafs,* memelihara kelangsuhan hidup;
3. *Hifẓal-‘aql,* menjamin kreativitas berpikir;
4. *Hifẓan-nasl,* menjamin keturunan dan kehormatan;
5. *Hifẓ al-māl,* pemilikan harta, property, dan kekayaan.

Jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial.

*Grand theory* yang telah dipaparkan di atas perlu dikuatkan analisisnya melalui *middle theory* demi mengerucutkan hasil analisis ke depan, terutama dalam menganalisis usia minimal pernikahan menurut per undang-undangan di Indonesia. *Middle theory* dalam penelitian ini teori *maṣlahat*. Dari segi bahasa kata *maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلح) yang berarti baik.[[38]](#footnote-39)*Maṣlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.[[39]](#footnote-40)

Secara sederhana *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Artinya mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’.[[40]](#footnote-41)  Suatu kemaslahatan harus  seiring dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.  Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu  adalah tujuan dan kehendak syara’,  bukan  didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

Tujuan syara’  dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.  Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu  ialah sesuatu yang baik  secara rasional juga harus sesuai dengan  tujuan syara’.

Berdasarkan *grand* dan *middle theory* di atas, maka demi mendapatkan hasil analisis yang objektif dan ilmiah maka dibutuhkan teori penerapan (*applied theory*) yaitu teori Keadilan John Rawls. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of thers*. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism,* dan *The Law of Peoples,* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.[[41]](#footnote-42)

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and office open to all*[[42]](#footnote-43)*.* Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatiknya.

Sementara itu, teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua idefundamental. *Pertama,* masyarakat sebagai sistem kerja sama social yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.*Kedua*, manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerja samayang fair itu? Apa syarat-syaratnya? Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang tepat untuk berbagi nikmat dan beban dari kerja sama sosial.[[43]](#footnote-44)

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *“liberal-egalitarian of social justice”*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial *(social institutions).* Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.[[44]](#footnote-45)

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan *(call for redress)* masyarakat pada posisi asli *(people on original position).* Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar *(original agreement)* anggota masyarakat secara sederajat.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.[[45]](#footnote-46)

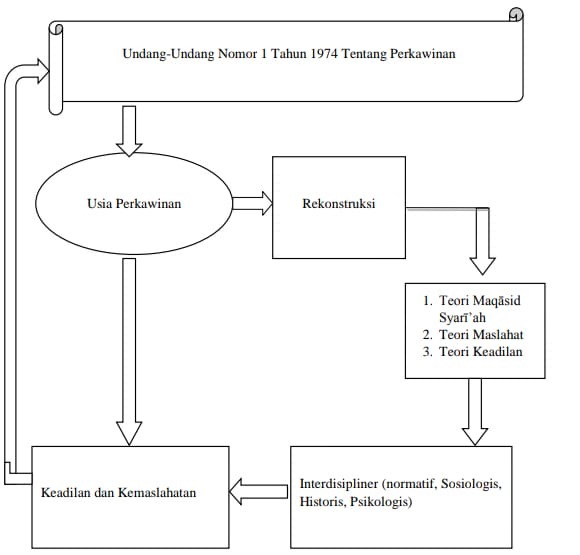
Konsep umum keadilan sosial Rawls. *Pertama,* prinsip pokok keadilan social adalah *equality* atau kesamaan. *Kedua*, kesamaan dalam distribusi. *Ketiga*, tercapainya nikmat-nikmat primer *(primary goods). Keempat*, ketidaksamaan *(inequalities)* dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, yaitu kesamaan *(equality)* dan ketidaksamaan *(inequality)*. Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmatnikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.[[46]](#footnote-47)

Konsepsi yang khusus mengenai teori keadilan John Rawls bahwa semua nikmat-nikmat primer *(primary goods)* masuk ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. *Pertama*, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga *(equal basic liberties)*, yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati nurani, bebas dari penahanan dan penagkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *the rule of law)*. Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental *(basic rights)* sama.[[47]](#footnote-48) Dan kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua. Pada intinya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan *(equal liberty)* sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi *(economic* *equality) d*an ketidaksamaan sosial *(social inequality)* yang memberikan kesempatan secara *fair.[[48]](#footnote-49)* Prinsip politik harus lebih dahulu dari pada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dalam menguraikan teori keadilan, John Rawls menggunakan argumen intuitif sebagai landasan utama dalam mencermati kebijakan-kebijakan struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang terbelakang. Rawls meyakini bahwa dengan menggunakan argumen intuitif, teori keadilan setidaknya memberikan nilai penting bagi terciptanya empati dan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Bagan 1

Kerangka Pikir



**F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau karya tulis ilmiah sudah pasti memerlukan metode dan teknik penulisan untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data penelitian ini, penulis menempuh metode dan teknis penulisan sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya, terutama hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru[[49]](#footnote-50). Yang dimaksud disini adalah teori-teori balig/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai *maṣlahah* dalam usia pernikahan menurut fiqh dan hukum Islam interdisipliner. Selanjutnya penulis menganalisa data-data dan fakta-fakta yang telah didapatkan berupa pemaparan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung makna dan maksud tertentu.

1. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analitik yaitu yang diawali dengan mendiskripsikan tentang penentuan usia perkawinan dalam perundan-undangan, kemudia penyusun berusaha menghadirkan pembaruan hukum keluarga Islam dengan menggagas rekonstruksi usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

1. **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk tulisan huruf-huruf, angka, tabel dan grafik dan lain-lain yang bersumber dari buku-buku, laporan penelitian, survey, interview, observasi yang mengandung informasi baik yang berhubungan langsung dengan judul penelitian maupun tidak berhubungan secara langsung. Dengan demikian penulis melakukan analisis terhadap data penelitian tersebut dengan menggunakan kata perkata atau perkalimat. Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai.

Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan:

a. Ketentuan hukum balig/dewasa untuk nikah dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Nilai-nilai maṣlahah mursalah yang terkandung dalam usia minimal pernikahan dalam undang-undang, dan hukum Islam intersipliner.

**4. Sumber Data**

Dari sudut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifat literatur dan kepustakaan. Yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[[50]](#footnote-51)

**5. Metode Pengumpulan data**

Karena jenis data yang digunakan adalah kualitatif, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu mencari rujukan teori yang ada dalam buku-buku yang terkait dengan pokok permasalahan dan sekaligus melakukan pengutipan terhadap data yang dianggap perlu dengan mencatat ke dalam daftar data yang disusun menurut susunan rencana kegiatan laporan penelitian. Dengan demikian seluruh data yang terkumpul langsung tersusun dalam bentuk kelompok data yang siap untuk dianalisis.

**6. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner dengan memperhatikan aspek normatif, sosiologis, historis, dan psikologis. Aspek normatif digunakan untuk menelusuri dan menjelaskan data pengaturan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.[[51]](#footnote-52) Sedangkan aspek sosiologis, historis, dan psikologis digunakan untuk menganalisis bagaimana usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, mulai dari konsepsi usia perkawinan menurut agama dan negara, sejarah sosial legislasinya, dan merekonstruksi kembali usia perkawinan yang berkeadilan.

**7. Analisa Data**

Secara terperinci analisis penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menentukan data yang berhubungan dengan konsep balig/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai *maṣhlahah* dalam usia minimal pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam intersipliner.
2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan konsep balig/dewasa untuk nikah dalarn hukum Islam, nilal-nilai *maṣlahah* dalam dalam usia minimal pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam intersipliner.
3. Memilih dan memilah data dengan cara menandai chapter-chapter buku-buku sumber, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan kcnsep balig/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai *maṣlahah* dalam usia minimal pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam intersipliner.
4. Mengelompokan data, berdasarkan kategori (pertanyaan penelitian) yang berhubungan dengan konsep balig/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai maṣlahah dalam dalam usia minimal pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam intersipliner.
5. Mengolah data, merumuskan dan data yang ada melalui pemikiran penulis, atau menjembatani yang ada dengan kalimat sambung terhadap data-data yang berhubungan dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam Hukum Islam, nilai-nilai *maṣlahah* dalam dalam usia minimal pernikahan menurut undang-undang, dan hukum Islam intersipliner
6. Mengkaji Data, dengan tujuan memverifikasi data yang diramu apakah valid atau tidak, berhubungan atau tidak, nyambung atau tidak dengan konsep baligh/dewasa untuk nikah dalam hukum Islam, nilai-nilai maṣlahahdalam m usia minimal pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam intersipliner.
7. Analisis Data, mengkritisi dan menilai data menurut sumber yang bersangkutan dengan menggunaan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian dalam karya disertasi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan pikir, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian tinjauan umum tentang usia minimal perkawinan dalam teks dan konteks. Mengawali uraian bab ini, peneliti memaparkan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan sebagai perbuatan orang dewasa, usia perkawinan menurut imam madzhab, usia perkawinan di negara Islam modern, faktor-faktor terjadinya perkaninan di bawah umur, dan usia perkawinan perspektif hukum Islam interdisipliner.

Bab III usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Uraian bab III ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaturan usia perkawinan, usia minimal perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, diskursus usia perkawinan pasca berlakunya UU No 1 tahun 1974, kedewasaan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV menjelaskan tentang analisis usia perkawinan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada Bab IV peneliti akan membahas tentang ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, dan rekonstruksi usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia yang berkeadilan.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

1. Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014), h. 103. Tentang ini, setidaknya dalam catatan Anderson, dalam hal praktis seperti bagaimana cara negara-negara berpenduduk Muslim mengakomodir hukum keluarga Islam, merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia dalam menciptakan masing-masing system hukum keluarganya, mulai dari penerapan tradisi syari’ah secara utuh, meninggalkan syari’ah (sekuler) hingga yang mengkompromikan keduanya. Oleh sebab itu, di lihat dari coraknya, tidak berlebihan jika Indonesia dimasukkan dalam kategori yang disebut terakhir ini. Lihat J.N.DAnderson, *Hukum Islam di Dunia Modern,* alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: TiaraWacana Yogya, 1994), h. 91. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h.v. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ratno Lukito, ‘kata pengantar’ dalam Maltuf Siroj*, Pembaruan Hukum Islam diIndonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. v. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 119. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*. h. 257. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*., h. 26. [↑](#footnote-ref-7)
7. Maltuf Siroj*, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2012),h. 132. [↑](#footnote-ref-8)
8. Setidaknya dalam ketentuan penutup pasal 66 UUP disebut: “ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. [↑](#footnote-ref-9)
9. Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih Syafi’i, misalnya, ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda ihtilam dan haid pada wanita umur 9 tahun. Salim bin Samir al-Hadrami (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tt), h. 15-16. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18(delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “*rate*” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.” [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 7 UUP ayat (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. [↑](#footnote-ref-13)
13. Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu halyang paling masuk akal dalam pembagunan negara, menurut Ratno, tidak ketemu dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan pemerintah dalam masalah usia pekawinan. Ratno Lukito*, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, h. 269-270. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lihat Pasal 15 ayat (1) :”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,” dan ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.” [↑](#footnote-ref-15)
15. Maltuf Siroj*, Op.Cit* h. 132. [↑](#footnote-ref-16)
16. CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada subtansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h. 133. [↑](#footnote-ref-17)
17. Penjelasan umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c): “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dantanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan.” Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBHAPIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI. [↑](#footnote-ref-19)
19. Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), h. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masareproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, perempuan dianjurkan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), h. 11 dan 20. [↑](#footnote-ref-20)
20. Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender”, h. 100. [↑](#footnote-ref-21)
21. Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” [↑](#footnote-ref-22)
22. Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2011”, h. 3. [↑](#footnote-ref-23)
23. Dalam Tajuk Rencana harian *Kompas* (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) masih terlampau tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana harian *Kompas*, “Relevansi Peringatan Hari Kartini” tanggal 21 April 2015. [↑](#footnote-ref-24)
24. Antonius Wiwan Koban, Revisi Undang-Undang Perkawinan dalam Adinda Tenriang ke Muchtar (ed.), *Update Indonesia,* The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, Maret 2010, h. 3. [↑](#footnote-ref-25)
25. Dalam KUH Perdata pasal 330, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan pasal 50 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih. [↑](#footnote-ref-26)
26. Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah *Compilation of laws* atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Kompilasi hukum islam merupakan hasil consensus (ijma’) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan seara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam diIndonesia dalam kaitan ini kata hukum Islam harus harus diartikan hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmad *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2003),h. 32 [↑](#footnote-ref-27)
27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Diakses pada tanggal 16 April 2019. [↑](#footnote-ref-28)
28. <http://www.harnas.co/2016/07/21/5-provinsi-tertinggi-nikah-dini>. diakses pada tanggal 7 April 2018. [↑](#footnote-ref-29)
29. Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, h. 9, 19 dan 47. [↑](#footnote-ref-30)
30. Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011). [↑](#footnote-ref-31)
31. Shofiyullah, *Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Tesis Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2013). [↑](#footnote-ref-32)
32. Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam*: *Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. [↑](#footnote-ref-33)
33. Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo*, Tesis Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2013. [↑](#footnote-ref-34)
34. Nur Fadilah dan Khairiyati Rahmah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih), (STAIN Tulungagung: t.th), h.5. [↑](#footnote-ref-35)
35. A. Kumedi Ja’far, Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan menganalisis Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan, Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018 [↑](#footnote-ref-36)
36. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 77 [↑](#footnote-ref-37)
37. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (LPPM Unisba, 1995), h, 100 [↑](#footnote-ref-38)
38. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), h, 345 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid [↑](#footnote-ref-40)
40. Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), Jilid I, h. 286 [↑](#footnote-ref-41)
41. Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls,* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), h. 135. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*, h. 303. [↑](#footnote-ref-43)
43. John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1973),viii, h. 4 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.,* h. 139-140. [↑](#footnote-ref-45)
45. John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006*, Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*, h. 65 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid*, h. 61 [↑](#footnote-ref-48)
48. Rawls berpandangan bahwa meskipun prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Rumusan ini membedakan posisi hak-hak dan kemerdekaan fundamental dari keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan-tapi kesamaan kemerdekaan *(equal liberty)* diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain *(equal opportunity* dan *equal distribution)*. Sementara itu, prinsip kedua (ketimpangan atau ketidaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial) oleh Rawls dipecahkankaln lagi ke dalam dua bagian, juga dengan urutan prioritas leksikal, yaitu masalah ketidaksamaan distributive dan kesamaan kesempatan yang fair bagi posisi dan jabatan publik yang harus terbuka bagi semua. Khusus terkait dengan masalah kesamaan kesempatan ini, Rawls menyebutnya dengan istilah prinsip perbedaan *(the difference principle)*. Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan system. Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki wilayah jangkauan penerapan yang berbeda-beda. [↑](#footnote-ref-49)
49. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universtas Indonesia Press, 1986), cet ke-3, h. 10 [↑](#footnote-ref-50)
50. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137. [↑](#footnote-ref-51)
51. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 25 [↑](#footnote-ref-52)